

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya setiap negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu negara memerlukan pembangunan ekonomi yang adil, namun dalam prosesnya ini negara telah memberikan prioritas khusus pada pertumbuhan ekonomi yang pesat di wilayahnya masing-masing yang menimbulkan permasalahan seperti kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. (Wicaksono, 2018).

Adanya masalah kemiskinan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi yang salah. Melalui pertumbuhan ekonomi bisa dilihat pola pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Apabila perekonomian berjalan dengan baik maka seluruh pelaku ekonomi termasuk bisa menikmati manfaat tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara adil dan wajar. Bentuk pertumbuhan ekonomi secara langsung tercermin dalam PDB (Produk Domestik Bruto) yang meningkat secara keseluruhan. (Arsyad, 2010).

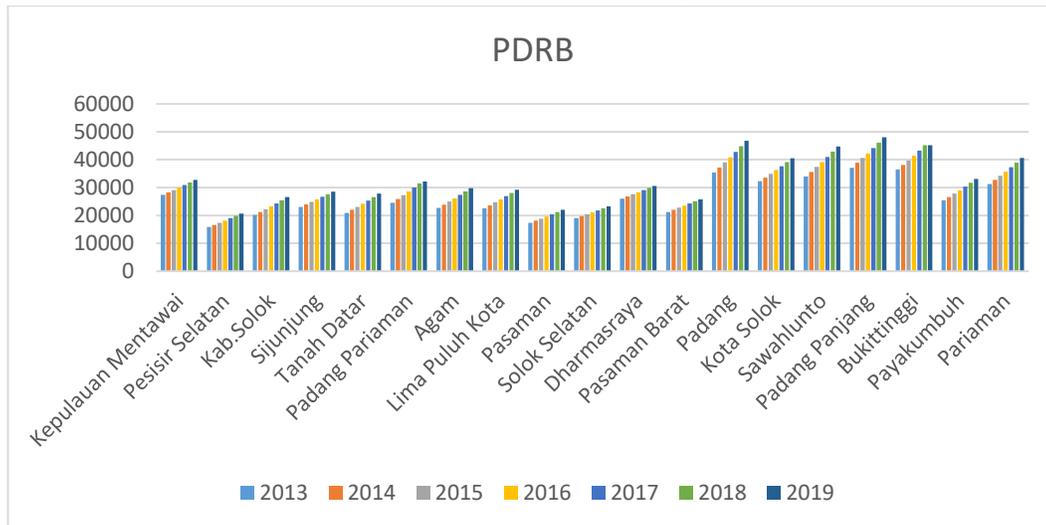
Dalam jangka panjang, proses pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berkelanjutan tidak cukup untuk menunjukkan bahwa telah terjadi pembangunan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak serta merta berarti sukses dalam proses pembangunan. Padahal, dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat akan memberikan dampak pada ketidakmerataan distribusi pendapatan, karena pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selalu seimbang. Dalam pembangunan

ekonomi, terdapat trade-off antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan. Dalam pembangunan ekonomi yang lebih memperhatikan pemerataan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, begitu juga sebaliknya. (Arif dan Rossy, 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun target pertumbuhan ekonomi tahunan telah tercapai, namun pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) masih belum dapat menyelesaikan permasalahan fundamental di negara berkembang. Kuncoro (1997) menganjurkan terutama untuk Negara Sedang Berkembang (NSB) menerapkan strategi pertumbuhan terdistribusi, yang berarti NSB tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan distribusi pembangunan, yang dapat dicapai melalui peningkatan lapangan kerja, investasi sumber daya manusia, petani kecil dan juga perhatian pada sektor informal dan pengusaha ekonomi lemah. Efek negatif dari ketimpangan adalah efisiensi ekonomi yang rendah, yang melemahkan stabilitas dan persatuan sosial, dan ketimpangan yang tinggi akan dianggap tidak adil. (Todaro, 2004).

Sebagai salah satu negara berkembang, pembangunan ekonomi Indonesia perlu menjadi perhatian apakah pertumbuhannya telah tercapai terdistribusi pendapatan secara merata. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat kasus di Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 1.1
PDRB per kapita dasar harga konstan (ribu rupiah) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2019



Sumber: BPS Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten kota, seperti yang bisa kita lihat pada grafik 1.1 PDRB seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat meningkat dari tahun 2013-2019, namun demikian, terlihat bahwa PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berbeda-beda. Wilayah perkotaan memiliki rata-rata PDRB perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata PDRB perkapita daerah pedesaan.

Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi merupakan kawasan perkotaan dengan PDRB perkapita yang lebih tinggi karena kawasan tersebut adalah pusat kegiatan berbagai sektor ekonomi. Sedangkan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pasaman merupakan contoh daerah pedesaan dengan

PDRB per kapita yang rendah disebabkan rendahnya tingkat produksi ekonomi di daerah tersebut.

Berbicara tentang ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah tidak hanya dilihat dari faktor Produk Domestik Bruto (PDRB), namun terdapat faktor lainnya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana biasanya indeks yang menggambarkan kondisi harapan lama sekolah dan produk nasional bruto suatu masyarakat pada daerah yang digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan pada suatu daerah serta jumlah penduduk miskin yang secara ekonomi dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok dan non pangan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Gambar 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2019

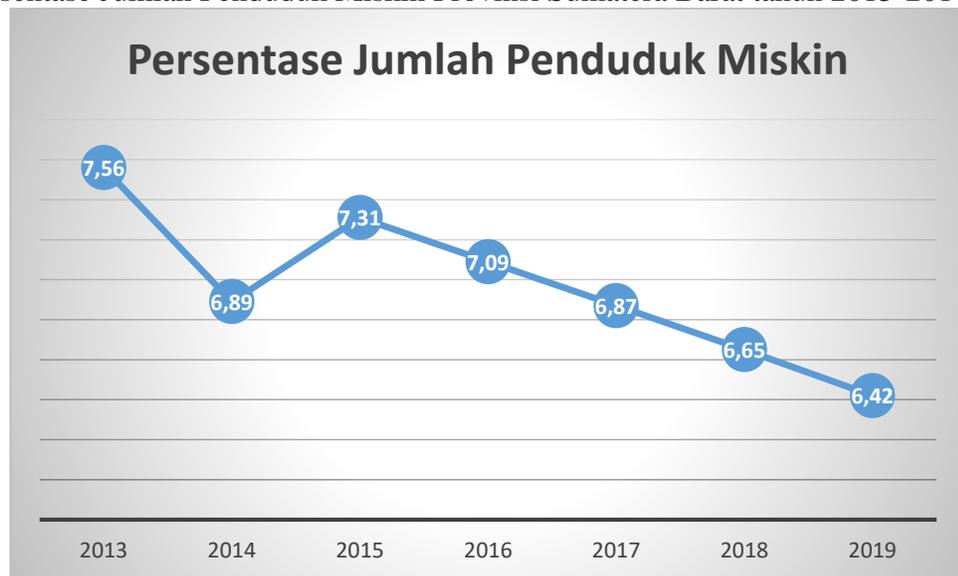


Sumber : BPS Sumatera Barat

Pada Gambar 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2013, indeks pembangunan manusia Sumatera Barat yaitu sebesar 56,33. Pada tahun 2014, 2015, dan 2016, indeks pembangunan manusia Sumatera Barat mengalami kenaikan secara perlahan dari tahun

sebelumnya yaitu berturut-turut sebesar 56,73, 57,41, dan 58,27. Pada tahun 2017 IPM mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 71,24. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan yang tidak begitu tinggi yaitu sebesar 71,73 dan 72,39.

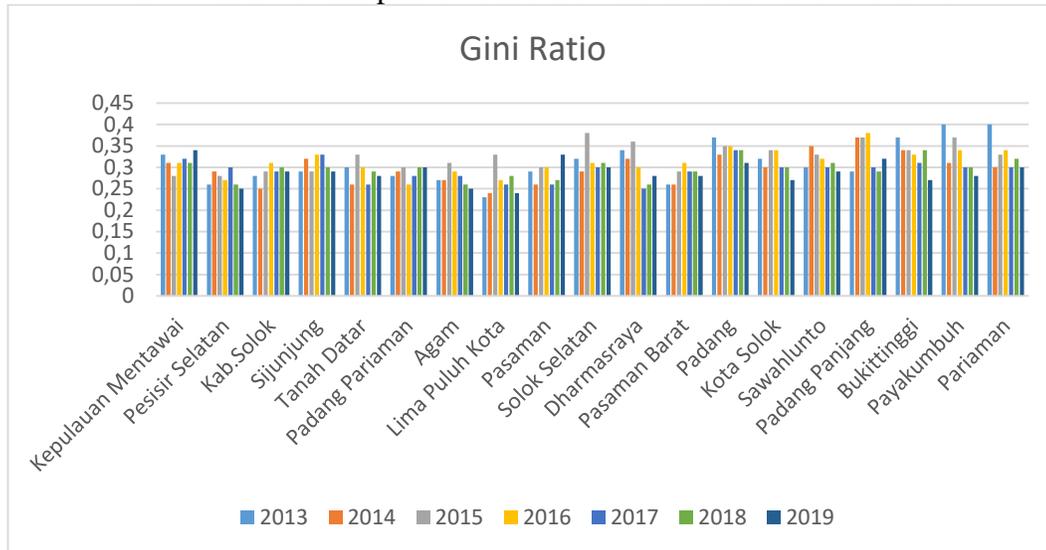
Gambar 1.3
Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2019



Sumber : BPS Sumatera Barat

Pada provinsi Sumatera Barat terlihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin di tahun 2013-2014 mengalami penurunan dari 7,56 menjadi 6,89 dan mengalami kenaikan di tahun 2015 sebesar 7,31. Sedangkan di tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 mengalami penurunan berturut-turut sebesar 7,09, 6,87, 6,65, dan 6,42. Namun walaupun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan ketimpangan distribusi pendapatan masih tetap ada di Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 1.4
Gini Ratio Perkabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2013-2014



Sumber: BPS Sumatera Barat

Jika Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita kabuten/kota di Sumatera Barat yang setiap tahunnya mengalami kenaikan seharusnya bisa memberikan dampak yang positif terhadap ketimpangan pendapatan yaitu menurunkan tingkat ketimpangan atau angka gini rasio di Sumatera Barat. Begitu juga dengan jumlah penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia yang sudah menunjukkan tren positif yaitu jumlah penduduk miskin mengalami penurunan di tahun 2013-2019 dan indeks pembangunan manusia yang terus naik di tahun 2013-2019.

Fenomena yang terjadi di periode 2013-2019 yang bisa kita lihat pada gambar 1.4 yang menunjukan gini rasio di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat malah mengalami fluktuasi, yaitu angka gini rasio mengalami naik turun setiap tahunnya. Angka gini rasio (ketimpangan) yang tertinggi berada di wilayah perkotaan seperti Kota Pariaman, Kota Padang, dan Kota Bukittinggi. Sedangkan gini rasio terendah berada di wilayah perdesaan seperti Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir

Selatan, dan Padang Pariaman jika di bandingkan dengan Rata-rata gini ratio Provinsi yang di atas 0,3.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat jika dilihat dari PDRB perkabupaten kota di Sumatera yang juga diikuti dengan kemiskinan yang terus menurun, dan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat pada setiap tahunnya yang diharapkan bisa mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan per kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Namun, fenomena yang terjadi factor-faktor tersebut tidak bisa menjamin rendahnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan per kabupaten kota di Sumatera Barat yang tetap bergerak secara fluktuasi.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya ketidakmerataan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Tertarik akan dengan ini penulis mencoba menganalisis ketidakmerataan pendapatan di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*”.

1.2 Rumusan Masalah

Ketidakmerataan pendapatan antar kabupaten/kota tidak terlepas dari pembangunan ekonomi selalu akan berada sejalan dengan perubahan ekonomi. Pembangunan ekonomi selama ini belum disebarakan secara merata dan sejalan dengan berjalannya ruang dan waktu. Beberapa provinsi atau daerah lain telah terganggu dan terhalang. Pada giliran berikutnya fenomena ini mendorong tumbuhnya ketidakmerataan pendapatan.

Berkaitan dari fenomenat di atas, maka masalah pokok yang akan muncul adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Poduk Domestik Bruto berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?
- 2) Apakah jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?
- 3) Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji besarnya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Untuk mengkaji besarnya pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Untuk mengkaji besarnya pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.